

## **Kerangka kerja untuk pengelolaan sumber daya pertanian, kemitraan, peningkatan kesejahteraan dan fasilitasi perluasan lapangan kerja bagi perempuan**

**Vita Cornelius**

Himpunan Wanita Karya DKI Jakarta  
Non-Governmental Organization Jl. Pegangsaan Barat  
email: vitacornelius@yahoo.com

### ***Abstract***

*To support economic growth and stability, the development of the agricultural sector is directed at increasing agricultural production and added value, expanding employment opportunities and increasing the income of most members of the community, ie women farmers. By using the above ideas, this paper takes the form of descriptive analysis to find the direction of explanation of the events experienced by the people of Indonesia. Subsequent events are organized into governance frameworks to address the problems occurring in Indonesia. Governments should continue to provide mutual support and engage women's cooperatives for collective decision-making to address unemployment and the poverty line. In addition we can not deny again that with the characteristics of Indonesia is very unique it is necessary role of Food SOEs to exist in the national food management. It takes the scope of cooperation through the MoU in order to benefit both parties in order to meet the regulations in their respective countries as well as to facilitate communication and exchange of information from the governments of both countries.*

*Keywords: village, village administration, Decentralization*

### ***Abstrak***

*Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan sebagian besar anggota masyarakat yaitu petani wanita. Dengan menggunakan pemikiran diatas, makalah ini mengambil bentuk analisis deskriptif untuk mencari arah penjelasan atas kejadian yang dialami masyarakat Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian disusun menjadi kerangka tata kelola untuk mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia. Pemerintah telah terus memberikan dukungan timbal balik dan mengajak koperasi wanita untuk pengambilan keputusan kolektif untuk mengatasi pengangguran dan garis kemiskinan. Selain itu tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa dengan karakteristik Indonesia yang sangat unik maka diperlukan peranan dari BUMN Pangan untuk eksis dalam pengelolaan pangan nasional. Dibutuhkan cakupan kerjasama melalui MoU agar dapat memberikan keuntungan kepada kedua pihak dalam rangka memenuhi peraturan di negara masing-masing sebagaimana juga untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi dari pemerintah kedua negara.*

*Keywords: economic stability, agriculture sector, women farmers, state-owned food, governance*

## 1. PENDAHULUAN

Upaya pembangunan ekonomi untuk bangkit dari kondisi krisis menjadi jauh lebih sulit karena dimensi permasalahannya yang cukup kompleks. Selain itu, dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, upaya pembangunan ekonomi masih telah berbagi dengan kepentingan program-program pembangunan bidang sosial yang secara tidak langsung juga memiliki keterkaitan seperti program pengentasan kemiskinan dan berbagai bentuk kesenjangan sosial, berbagai program pemeliharaan infrastruktur yang jauh tertinggal sejak timbulnya krisis, penataan kelembagaan pemerintahan untuk penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta pelaksanaan berbagai program di bidang pembangunan politik yang dewasa ini sangat dinamis terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam telah menjadi permasalahan yang kompleks dan diperdebatkan oleh baik ahli hukum, peneliti tata kelola maupun para pakar politik (Silalahi, D., & VIII, 2003). Masyarakat khususnya para pejuang agrarian juga seringkali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia ketika mereka telah menghadapi isu pengelolaan sumber daya alam di lingkungan mereka. Seringkali terdapat ketidakjelasan posisi mereka yang menambah persoalan baru di atas persoalan konflik agraria yang belum usai (Syafi'i, 2016). Ketetapan MPR No. IX tahun 2001 telah mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam terutama pada Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 6 TAP MPR ini

menyatakan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam salah satunya ditempuh dengan penyelesaian konflik-konflik mengenai sumber daya agraria yang timbul selama ini, sekaligus dapat mengatasi potensi konflik pada masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 (Sirait dan Kusworo, 1999).

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat penafsiran multi perspektif yang mengakibatkan ketetapan ini yang awalnya untuk menyelesaikan konflik justru membingungkan dalam pelaksanaan di lapangan. Meskipun negara melindungi identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (Saptomo, 2010). Namun, seringkali hak-hak masyarakat atas tanah atau hak partisipasi yang dikategorikan sebagai hak atas properti seringkali sulit dilaksanakan di lapangan akibat perbedaan penafsiran diantara para pakar hukum tata negara dan administrasi sumber daya alam (Rachman, *et al.*, 2012). Meskipun telah terdapat jaminan pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah yang termasuk hak ulayat di dalam konstitusi dan hak asasi manusia, namun dalam kenyataan di lapangan seringkali bertentangan dengan kebijakan-kebijakan agraria yang dikeluarkan pemerintah khususnya pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Pembangunan pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia (Hanafie, 2010). Data Survei Angkatan

Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2009 menunjukkan bahwa dari sejumlah 104 juta penduduk berumur 15 tahun ke atas, terdapat 43 juta orang yang lapangan pekerjaan utamanya di sektor pertanian terutama didesa-desa.

Beberapa permasalahan pertanian yang dirasakan selama ini menjadi kelemahan pembangunan pertanian dalam mendukung pembangunan pangan dan kesejahteraan petani adalah 1) adopsi dan inovasi teknologi tidak mengalami peningkatan secara signifikan, 2) skala usaha petani yang sangat tidak ekonomis, 3) daya tawar petani sangat rendah terhadap pelaku usaha distribusi, dan 4) pengawasan peredaran barang (hasil produksi) yang tidak fair. Dalam kenyataannya, agenda penguatan kapasitas penyediaan benih/bibit dan pelaku usaha dalam skala yang layak telah menjadi prioritas. Untuk itu, perlu ditumbuhkembangkan dengan baik melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.

Secara umum, penelitian ini bertujuan sebagai kerangka kerja untuk pengelolaan sumber daya alam, kemitraan kesejahteraan dan fasilitasi perluasan lapangan kerja. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kerangka kerja untuk pengelolaan sumber daya alam, kemitraan kesejahteraan dan fasilitasi perluasan lapangan kerja. Dimasa depan, basis pembangunan pangan telah didesain dengan kawasan (*food estate*) yang terintegrasi dengan penumbuhan industri, dimana pengembangan kawasan diharapkan mendorong berkembangnya "*corporate farming*" yang tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan

petani. Hak-hak masyarakat petani akan terus menjadi perhatian bagi pemerintah.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Pengertian kesejahteraan**

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya) (Poerwadarminto, 1999). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta "catera" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "catera" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012). Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan (Hikmat, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan telah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

### **2.2. Gender**

Kata *gender* dalam istilah bahasa indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*Gander*". Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara sex dan *gender*. Sering kali *gender* dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki – laki dan

perempuan). Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki – laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun – tahun bahkan berabad –abad maka sulit dibedakan pengertian antara seks (laki – laki dan perempuan) dengan *gender* (Nugroho, 2011).

Beberapa sosiologi maupun antropologi yang sekaligus sebagai pengamat pembangunan seperti Margaret Mead, Rae Lesser Blumberg, Fatima Mernissi dan Tinker menyepakati adanya hubungan negatif antara pembangunan sosio-ekonomi suatu negara atau modernisasi dengan pembangunan ekonomi, social dan berbagai perempuannya (Newberry, 2012). Margaret Mead, misalnya, menegaskan dalam suatu penelitiannya disuatu negara berkembang bahwa perempuan tidak diberi kesempatan terhadap akses teknik-teknik pertanian modern, sebagian karenan adanya nilai bahwa perempuan tidak dapat menangani mesin-mesin (T.O. Ihromi, 1995).

Lebih jauh lagi Irene Tinker (1990) menyakinkan kepada kita bahwa status dan peranan perempuan dinegara berkembang pada awalnya cukup tinggi dan dihargai oleh masyarakat. Artinya wanita memiliki partisipasi nyang setara dengan pria dalam kegiatan ekonomi. Tetapi ketika “ *Western model middel-class bias* “ dan pembangunan yang “ *sex male-bias*. “ Hal ini telah merasuki pemikiran perencana pembangunan, mereka telah mengabaikan arti penting dari peran wanita yang secara tradisional telah dimainkan perempuan di masyarakat dengan sistem ekonomi dan pertanian yang subsisten.

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mengkaji peran dan kedudukan/status sosial wanita tani, namun pada dasarnya bermula dari penelaahan *the family structure* (struktur keluarga) sebagai unit terkecil dalam sistem masyarakat dan kekerabatan . Levy (dalam Sajogyo 1994) mengemukakan pentingnya memperhatikan lima substruktur berikut: (1) diferensiasi peranan, (2) alokasi ekonomi, (3) alokasi solidaritas, (4) alokasi kewibawaan/kekuasaan, dan (5) alokasi integrasi dan ekspresi. Seluruh substruktur tersebut berfungsi sebagai pendukung kelangsungan hidup system kekerabatan dalam rumah tangga maupun dalam bersosialisasi dan bermasyarakat.

Menurut Lasswell dan Lasswell (1987) kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga akan menghasilkan peningkatan dalam keuangan keluarga, kepemilikan barang mewah, dan standar hidup yang lebih tinggi dengan pencapaian rasa aman yang lebih baik sehingga berdampak pada peningkatan status sosial keluarga. Puspitasari, (2014) menjelaskan bahwa keikutsertaan perempuan dalam mencari nafkah akan membawa dampak positif yaitu adanya peningkatan terhadap struktur sosial dalam keluarga. Pembagian kerja antara sesama anggota keluarga (laki-laki dan perempuan) dalam keluarga inti menunjukkan adanya diferensiasi gender yang merupakan suatu prasyarat struktural untuk kelangsungan keluarga inti (Megawangi, 1999). Kerja sama antara suami dan isteri yang semakin baik akan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang di harapkan.

### **2.3. Partisipasi BUMN dalam kesejahteraan petani**

Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan maupun kesejahteraan petani seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian BUMN mengeluarkan sebuah solusi program dalam bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang mulai digulirkan pada bulan Juni 2011, program tersebut adalah Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Pada dasarnya Program GP3K merupakan kegiatan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kelompok tani binaan dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Program GP3K sendiri merupakan suatu bentuk tanggung jawab BUMN sektor pertanian kepada masyarakat dalam bentuk Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Menurut Djajanto (2011, h.9) “Program GP3K merupakan suatu upaya untuk melibatkan dunia korporasi dalam mempersiapkan program ketahanan pangan, dimana masalah ketahanan pangan bukan selamanya didominasi pemerintah, namun melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah”. Adanya sinergi tersebut tentu tidak terlepas dari konsep *Good governance* dimana United Nations Development Program (UNDP) dalam Sjamsuddin (2006, h.11) mengartikan bahwa *Good governance* merupakan hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang baik dari semua aktor *governance* sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program

kemitraan GP3K, mulai dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, BUMN pelaksana, hingga masyarakat dalam hal ini petani mitra.

### **2.4. Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah**

Kesejahteraan petani merupakan tantangan pemerintah daerah di era otonomi. Otonomi daerah hendaknya mendekatkan pemerintah kepada petani, menunjukkan kepedulian kepada petani dan pertanian, mempercepat pemecahan masalah petani dan pertanian (Sunarti & Khomsan, 2006). Otonomi daerah Pemda memiliki posisi strategis dengan keleluasaan untuk menelorkan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang semakin fokus, bisa menemukan komoditas unggulan sesuai potensi lokal, dan menemukenali beragam upaya inovasi nilai tambah produk pertanian. Idealnya permasalahan yang dihadapi petani dan pertanian dengan cepat diketahui dan diberikan solusi yang memadai.

Oleh sebab itu, kegiatan koordinasi kebijakan yang ada di Indonesia masih ditataran politik tingkat rendah, yaitu lebih banyak menjalin persahabatan antara wilayah yang berlanjut pada kerja sama ekonomi dan tetap dibawah koordinasi serta supervisi pemerintahan pusat. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh 3 (tiga) kementerian utama, yaitu: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian teknis terkait.

Kerjasama tersebut juga bisa diarahkan untuk menjalin kesepahaman dan membangun persahabatan melalui pertukaran budaya, pendidikan dan sumber daya manusia sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian atau diplomasi

kebudayaan. Pemerintah kota Surabaya dan pemerintahan DKI Jakarta merupakan pemerintahan daerah yang paling banyak melakukan kerja sama untuk membangun kota pariwisata dan kota bisnis. Kerjasama itu juga bertujuan membangun pemerintahan daerah yang lebih menguntungkan daerah. Artinya bahwa hubungan dan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah dilakukan secara akomodatif untuk kepentingan daerah melalui koordinasi kebijakan dan mekanisme mensejahterakan masyarakat ditingkat lokal lewat pelaksanaan desentralisasi. Namun, dibutuhkan kewenangan dan landasan hukum agar koordinasi kebijakan tersebut dapat berlangsung jangka panjang dibawah koordinasi pemerintah daerah. Koordinasi kebijakan telah ditujukan untuk membangun hubungan dan kerja sama antar Pemerintah Daerah, misalnya, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur tercatat paling banyak melakukan koordinasi kebijakan untuk menghasilkan landasan hukum yang terstruktur bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama antar daerah yang lebih luas.

### **3. METODOLOGI**

Dengan menggunakan pemikiran diatas, makalah ini mengambil bentuk analisis deskriptif untuk mencari arah penjelasan atas kejadian yang dialami masyarakat Indonesia (Gulo, 2002). Peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian disusun menjadi kerangka tata kelola untuk mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia. Untuk itu dengan mengikuti definisi-definisi sebelumnya, penulis mengklasifikasikan masalah tersebut dalam empat tipe yang telah diidentifikasi

sebelumnya, yaitu ke dalam pengolahan sumber daya pertanian, kerjasama pertanian nasional dan internasional, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kemudian fasilitasi dalam perluasan lapangan kerja bagi perempuan di desa-desa. Dengan demikian, hal ini dimulai dari identifikasi permasalahan dan kemudian membandingkan untuk disusun ke dalam struktur tren peristiwa dan kemudian dijelaskan mengenai apa yang menjadi hasil kunci.

Meskipun masalah tidak disusun secara kronologis, namun didasarkan pada tingkat kepentingan dan kapasitas dari para pelaksana tata kelola dengan tren sekarang dan di masa yang akan datang. Meskipun kerangka tata kelola mungkin saja mengalami perubahan dari suatu studi ke studi yang lain. Tujuan dasar dari studi identifikasi tata kelola disini ialah mengumpulkan dan menganalisis persepsi profesional tata kelola untuk mengkonstruksi kerangka tata kelola yang dapat mengatasi masalah terjadi di Indonesia.

Pada tingkat terakhir ialah dilakukan perbandingan dan analisis mengenai kerangka tata kelola yang telah diidentifikasi, dicari persamaannya dan perbedaannya dan kemudian diambil kesimpulannya ke dalam analisis tren peristiwa untuk memperoleh fakta mengenai solusi terbaik. Dalam bagian analisis tren dilakukan pengamatan dan analisis tata kelola yang telah dilakukan dan dipertimbangkan untuk dapat diterapkan lebih luas dan diketahui manfaatnya.

### **4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, pembangunan sektor

pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan sebagian besar anggota masyarakat yaitu petani. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pemerataan, pembangunan pertanian juga berperan dalam mengentaskan penduduk dari kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah dan antargolongan masyarakat, serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memegang peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok masyarakat yang terbesar, di samping mendukung pertumbuhan industri.

Prahalad (2005) menunjukkan banyaknya kesempatan dan alternatif untuk mensejahterakan masyarakat kelas bawah sekaligus menguntungkan private sektor yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat kelas bawah atau yang disebut *"The Bottom of Pyramid"*. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik dapat meringankan beban masyarakat miskin sehingga bisa menjalankan usahanya dengan lebih longgar. Penciptaan pasar bagi kelas bawah yang jumlahnya sangat besar, dapat membuka keran lapangan usaha yang menguntungkan di segala bidang kebutuhan pokok manusia: pangan, pendidikan, kesehatan, barang kebutuhan rumah tangga, bahkan inovasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kesungguhan memecahkan masalah masyarakat kelas bawah yang proporsinya cukup besar, membuahakan kesejahteraan sekaligus

keuntungan bagi sector swasta. Menemukan permasalahan, mengetahui dan memperoleh solusi yang unik; menciptakan barang berkualitas namun dengan harga terjangkau dengan system pembayaran yang baik, didasari kepercayaan dan pengembangan dignity keluarga miskin.

Namun masih ditemukan kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani. Secara ekstrim telah kita sadari bahwa dengan perubahan faktor lingkungan strategis dan kelemahan yang dimiliki dalam proses produksi selama ini maka terjadinya permasalahan menjadi mungkin (risiko ekonomi, sosial dan politik menjadi pertaruhannya). Artinya, hal ini telah dipahami sebagai permasalahan bersama (bukan oleh kelompok atau hanya pemerintah saja). Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembangunan adalah:

- a. jumlah penduduk (karakteristik dan kelompok usia),
- b. lahan yang tersedia secara berkelanjutan (kawasan),
- c. efektivitas dan efisiensi pengembangan komoditas (kelayakan usaha),
- d. perubahan selera dan perilaku konsumen (desain industri),
- e. situasi perdagangan nasional dan internasional,
- f. perubahan iklim.

Butir yang perlu direnungkan adalah kita telah berani keluar dari "kebiasaan yang mungkin suatu saat menjebak". Sebagai contoh, China berani membangun "visi industri baru" dengan mendorong biaya murah sehingga hasil produksi mereka menjadi murah (walaupun beberapa hasil produk mereka tetap

berorientasi kualitas). Secara perlahan, mereka terus menciptakan “pangsa pasar diberbagai belahan dunia”.

Pada dasarnya, kita membutuhkan transformasi yang sangat fundamental, baik berkaitan dengan arah dan kebijakan pembangunan pangan nasional serta tahapan dan fokus komoditas secara teratur pengembangan “sistem” menjadi sangat mendesak. Hal ini sebagai tuntutan bagi penyelenggaraan pangan yang lebih baik. Memang, untuk menghasilkan sistem pembangunan pangan yang lebih baik diperlukan koordinasi dan fokus pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Oleh karena itu, pemetaan komoditas dan kewenangan serta formulasi anggaran pembiayaan yang diperlukan telah dirumuskan secara baik.

Keuntungan perluasan usaha dengan teknologi tepat guna dapat memberikan manfaat dan juga penambahan lapangan kerja. Namun terdapat tantangan utama wanita telah bekerja keras untuk mengenalkan dibanding rekan kerjanya laki-laki dalam usaha bisnis. Untuk bisa bekerja, setiap orang telah mampu memecahkan masalah sehingga dia telah bekerja keras meyakinkan majikan dan juga membutuhkan keberanian untuk memulai meyakinkan masyarakat. Selain itu dibutuhkan dukungan kemitraan untuk menyediakan fasilitasi dan juga pelatihan agar dapat menghasilkan agen pemberantasan kemiskinan lokal dengan mengorganisir kelompok wanita dari keluarga berpendapatan rendah untuk membentuk usaha ini.

Dukungan keuangan juga diperlukan terutama melalui pinjaman bank, dan subsidi dewan lokal, agar dapat mengelola infrastruktur dasar dan

pembelian peralatan. Pelatihan lebih lanjut di bidang perakitan, penginstalan, dan perbaikan juga perlu diperoleh dari bantuan perusahaan melalui program peningkatan performa. Dari sisi ketenagakerjaan, perlu dilakukan pelatihan pelayanan pada konsumen, penyediaan penerbitan cetakan untuk menghasilkan dukungan ekonomi dan sosial untuk keluarga sambil memperluas lapangan kerja berbasis kemandirian dan kebebasan untuk bergerak melalui ketrampilan komunikasi dan kemandirian agar menghasilkan pengetahuan dalam bidang kerja.

Selain itu, dengan munculnya persaingan ke depan, maka perlu segera mengambil kesempatan baru, membangun kemandiriannya kerja, dan meningkatkan inspriasi pribadi dan sosial sehingga dapat menjadi pelopor dalam emansipasi wanita dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Misalnya, NVIWODA – *the Ntulume Village Women Development Assoiciation* sebagai asosiasi pengembangan wanita desa di Ntulume, memfokuskan pada kegiatan tradisional seperti pembuatan Selai. Melalui dukungan Lembaga Commonwealth dengan beasiswa memungkinkan dia menjalankan pelatihan kewirausahaan di India. Sekembalinya dari pelatihan, para pelopor mendirikan Pusat Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, yang berfokus pada pendirian sekolah lokal dan mendapatkan keahlian yang diperlukan. Kedua, dengan mengikuti NVIWODA, terdapat pengembangan usaha yang dipartisipasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja setiap anggotanya.

Dengan demikian untuk memperluas lapangan kerja dibutuhkan

tata kelola ekonomi dan juga dukungan pengembangan pelatihan yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan mengirim tenaga muda yang giat belajar dan mampu mentransfer pengetahuan kepada masyarakat setempat. Partisipasi semacam ini sangat penting agar menghasilkan keluaran utama untuk memungkinkan mereka bekerja lebih aktif dan lebih cepat dengan teknologi tepat guna. Hal ini juga membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong lembaga Misi Keaksaraan Nasional dan mengenalkan wanita untuk bergabung bersama dan menciptakan usaha teknologi tepat guna yang berusaha pada investasi awal.

Namun, hal ini dapat terkendala masalah sikap konservatif gender tradisional dari masyarakatnya. Untuk itu dibutuhkan model peran sebagai satu orang yang telah membuat perbedaan pada kehidupannya, dengan bekerja keras dan dedikasi. Pemerintah telah terus memberikan dukungan timbal balik dan mengajak koperasi wanita untuk pengambilan keputusan kolektif untuk mengatasi pengangguran dan garis kemiskinan. Dengan memberikan akses kesempatan untuk pendidikan dan sponsor Pengembangan Masyarakat, dan membangun suasana tim kerja dan hubungan yang solid antar wanita dalam usaha tersebut, akan lebih mudah bagi generasi muda untuk mengambil peran besar dalam pengambilan keputusan bekerja.

Namun, memperkenalkan teknologi tepat guna membutuhkan waktu dan juga kesiapan masyarakat untuk mengambil

inisiatif. Apalagi pada pekerjaan di bidang Teknologi Informasi (IT), dibutuhkan dukungan dan juga pelatihan intensif agar mampu menerapkannya di tempat kerja yang terkadang jauh dari rumah dan perjuangan agar pelatihan dapat diperbarui sesuai kebutuhan lapangan kerja.

#### **4.1. Kerjasama internasional**

Kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat dicapai sendiri. Dibutuhkan cakupan kerjasama melalui MoU agar dapat memberikan keuntungan kepada kedua pihak dalam rangka memenuhi peraturan di negara masing-masing sebagaimana juga untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi oleh pemerintah kedua negara. Misalnya, dalam konsep *MoU on Promoting Trade of Legal Timber Products from Sustainably Managed Forests* telah diinisiasi pihak Indonesia untuk didiskusikan secara teknis dengan target *endorsement* pada akhir 2015. Hal ini ditindak lanjuti dengan koordinasi lebih intensif dengan Direktorat Teknis terkait dan Kementerian Kehutanan atas kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan WGAFC ke-19 dan akan menjadi bahan untuk pertemuan selanjutnya yaitu WFAFC ke-20 di Indonesia.

Dalam Pertemuan *the 6th General Meeting Coalition for African Rice Development (CARD)*, 17-19 November 2015 di Accra, Ghana, sebagian besar perwakilan dari Kementerian Pertanian negara-negara Afrika dan ASEAN serta berbagai organisasi dan lembaga keuangan internasional seperti JICA, IRRI, JIRCAS, African Rice, NEPAD, AGRA, *World Bank*, *African Development Bank* dan beberapa produsen produk pertanian dari India dan Indonesia.

Mereka secara bersama memahami bahwa dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan produksi padi di negara-negara Afrika dan ASEAN melalui proyek pengembangan sampai tahun 2018. Mereka juga menyadari perlu meningkatkan pasokan benih padi berkualitas dari negara-negara anggota CARD dengan cara melakukan identifikasi strategi bagi peningkatan benih padi melalui peningkatan kemampuan petani dan peneliti, perbaikan kelembagaan, pemuliaan dan kredit. Bahkan setiap negara yang tergabung dalam CARD telah menyusun NRDS (*National Rice Development Strategies*) yang mencakup aspek kebijakan nasional, potensi, benih, target capaian, pupuk, sarana dan prasarana, pemasaran dan hal lain yang diperlukan. Hal ini membutuhkan pertukaran pengalaman dan dialog tentang kebijakan publik bagi petani di Afrika dan ASEAN untuk peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman untuk penyediaan rantai pasok beras dan peternakan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Terkait dengan area kerja sama bidang peternakan, ketua delegasi Indonesia menyarankan bahwa pada pertemuan ini sebaiknya menunda pembahasan isu FMD/PMK mengingat saat ini kebijakan untuk mengimpor daging kerbau India masih dalam tahap pengkajian oleh Tim Ahli. Selanjutnya, terkait dengan isu sumber daya genetik tanaman dan perikanan juga diusulkan untuk tidak dibahas juga pada pertemuan kali ini, mengingat perlu pembahasan internal dan konsolidasi dengan instansi terkait di Indonesia. Pihak India mengusulkan agar Indonesia

mempertimbangkan untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan teknologi low input untuk peternakan unggas. Selain itu, pihak India menawarkan program-program pelatihan untuk tahun 2016-2017 di bidang peternakan khususnya manajemen nutrisi unggas dan teknologi pengembangan laboratorium. Pihak India juga menawarkan kegiatan pertukaran pelajar dan internship *antara Indian National Institutes on Agriculture Extension* dan instansi terkait di Indonesia.

Terkait dengan impor daging kerbau (*bovine meat*) dari India, pihak Indonesia menyampaikan baru menerima proposal dari Pemerintah India pada akhir bulan September dan saat ini sedang dilakukan penilaian terhadap proposal tersebut. Disampaikan pula bahwa tim audit dari Kementerian Pertanian yang mengunjungi India pada bulan September-Oktober 2015 dalam rangka melakukan penilaian secara komprehensif terhadap proses pengolahan daging kerbau, saat ini sedang menyusun laporan penilaian teknis. Sebagaimana dimaklumi, peraturan Indonesia masih melarang impor daging dari negara yang belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), dengan mengacu asas *country-based*. Pihak India mengharapkan Indonesia untuk menyampaikan informasi terkait penggunaan singkong sebagai alternatif pakan unggas dan hewan lainnya di Indonesia. Bahkan, terdapat kemungkinan kerja sama pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam system penyuluhan pertanian, serta pemetaan sumber daya pertanian Indonesia untuk mendukung perencanaan pembangunan pertanian kedepan yang lebih baik.

Namun, terdapat isu akses pasar, dimana pihak India meminta Indonesia dapat mempertimbangkan impor gula (*raw sugar*) mengingat produksi gula India selalu melimpah dan India sedang mencari pasar yang baru. Pihak Indonesia juga mencatat permintaan pihak India dalam penerapan tarif masuk bagi komoditas gula India yang sama sebagaimana diterapkan bagi gula asal Thailand, yakni 5%. Saat ini, gula India masih dikenai tarif masuk sebesar 15%. Dengan demikian, terdapat tantangan dan peluang dalam mengelola fasilitas rantai pasok untuk menjamin pasokan komoditas pertanian, khususnya buah dan sayur dengan kualitas, kuantitas, serta kontinuitas pasokan yang terjamin sepanjang tahun.

Terkait dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian dimulai dengan peningkatan kapasitas untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional melalui produk pertanian dan peternakan. Khusus sektor kehutanan, dibutuhkan pengembangan kerjasama science and technology melalui kolaborasi dengan universitas luar negeri. Sementara itu, di sektor perikanan, perlu upaya green campaign dalam dan merealisasikan kegiatan untuk mensejahterakan petani dan melindungi hak mereka atas berkebun, bertani dan juga atas lahan mereka.

#### **4.2. Dukungan BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan Petani**

Selain itu tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa dengan karakteristik Indonesia yang sangat unik maka diperlukan peranan dari BUMN Pangan untuk eksis dalam pengelolaan pangan nasional. Sebetulnya, BUMN hadir dalam memberikan

kontribusi pada pangan nasional bukan hal baru, namun sudah ada sejak penjajahan Belanda. Hal ini sangat terlihat jelas di subsektor perkebunan (perkebunan sawit, perkebunan teh, perkebunan gula, dan lain-lain). Adapun kelemahan yang terjadi saat ini adalah “optimalisasi BUMN tersebut”. Beberapa faktor yang mempengaruhi kelemahan optimalisasi BUMN antara lain 1) karena konsisten lahan-lahan yang menyuplai sering mengalami perubahan seperti lahanlahan tebu serta 2) orientasi dna budaya bersaing belum dimiliki secara menyeluruh. Resistensi persoalan lahan tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam memberikan penilaian bahwa peranan BUMN tidak diperlukan. Hal ini telah kita hindari dalam mencari solusi pembangunan pangan nasional.

Satu catatan lain yang sedang dan akan terus berkembang adalah “infiltrasi perusahaan-perusahaan internasional di bidang pangan akan terus berlangsung”. Perusahaan-perusahaan internasional sangat berkepentingan menguasai “perdagangan mulai dari hulu sampai hilir” dengan mengandalkan kekuatan *Research and Development (R and D)* serta kolaborasi negosiasi bisnis yang sangat kuat. Oleh karena itu, BUMN Pangan telah dijadikan sebagai “*benchmark*” baru dalam memberikan solusi bagi permasalahan pangan selama ini.

Misalnya, pada BUMN penyedia pupuk, mereka telah menghadapi persoalan mendasar berupa kesenjangan antara kebutuhan akan produk pertanian input dengan pasokan pupuk itu sendiri yang disebabkan oleh perbedaan harga pupuk yang ditetapkan pemerintah dengan

harga riil di lapangan. Selain itu, sasaran masyarakat petani penerima subsidi pada kebanyakan kasus tidak tepat sasaran. Peran produsen pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 pada dasarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sejatinya petani setidaknya mendapatkan manfaat dari pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi BUMN industri pertanian khususnya pupuk. Selain itu ditambah dengan tingkat pengetahuan petani yang sulit beradaptasi dengan tekanan pasar mengakibatkan kehidupan petani jauh dari sejahtera. Oleh karena itu, peran BUMN industri pertanian dalam hal ini pupuk dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani belum optimal. Dengan demikian, prinsip GCG yang menjadi dasar pengelolaan/ pengurusan serta pengawasan BUMN telah terus ditingkatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dibutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan dan juga peraturan perundang-undangan agar BUMN bekerja optimal mensejahterakan masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengatur prinsip-prinsip pengelolaan BUMN. Namun, pengambilan kebijakan perusahaan agar memenuhi rambu-rambu aturan membutuhkan Direksi yang bekerja secara profesional untuk mengantisipasi kerugian. Dalam Pasal 104 UU PT, sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahannya, maka Direksi dapat terlepas dari penuntutan untuk melaksanakan pertanggungjawaban secara tidak terbatas. Dalam kenyataannya, hal tersebut tidak

dapat sepenuhnya dilaksanakan BUMN. Pengambilan kebijakan BUMN yang setelahnya berorientasi bisnis murni, akan tetapi tidak dapat dilakukan karena seringkali berbenturan dengan peraturan-peraturan yang mengakibatkan peran BUMN menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi tidak dapat optimal dilakukan. Apabila BUMN rugi akibat pengambilan kebijakan dan prinsip-prinsip perusahaan termasuk di dalamnya prinsip GCG, BUMN tetap dapat dikenai tuntutan merugikan keuangan negara sesuai UU BUMN, UU PT, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai prinsip-prinsip pengelolaan BUMN dan kategori kekayaan BUMN sebagai sumber keuangan negara. Dengan demikian, tata kelola BUMN menentukan tingkat kemampuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan sebagian besar anggota masyarakat yaitu petani wanita.

- b. Pemerintah telah terus memberikan dukungan timbal balik dan mengajak koperasi wanita untuk pengambilan keputusan kolektif untuk mengatasi pengangguran dan garis kemiskinan. Dengan memberikan akses kesempatan untuk pendidikan dan sponsor Pengembangan Masyarakat, dan membangun suasana tim kerja dan hubungan yang solid antar wanita dalam usaha tersebut, akan lebih mudah bagi generasi muda untuk mengambil peran besar dalam pengambilan keputusan bekerja.
- c. Selain itu tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa dengan karakteristik Indonesia yang sangat unik maka diperlukan peranan dari BUMN Pangan untuk eksis dalam pengelolaan pangan nasional.
- d. Dibutuhkan cakupan kerjasama melalui MoU agar dapat memberikan keuntungan kepada kedua pihak dalam rangka memenuhi peraturan di negara masing-masing sebagaimana juga untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi dari pemerintah kedua negara.
- e. Terkait dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian dimulai dengan peningkatan kapasitas untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional melalui produk pertanian dan peternakan. Dibutuhkan pengembangan kerjasama science and technology melalui kolaborasi dengan universitas luar negeri. Sementara itu, di sektor perikanan, perlu upaya green campaign dalam dan merealisasikan kegiatan untuk mensejahterakan petani dan melindungi hak mereka

atas berkebun, bertani dan juga atas lahan mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, R., (2011). *Gender Dan Strategi Pengurus Di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Syafi'i, I. (2016). *Konflik Agraria Di Indonesia:Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit Di Kotawaringin Timur*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18 (3), 97-114.
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal:revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.
- Rachman, N. F., Mary, S. R., Arizona, Y., & Firmansyah, N. (2012). *Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Kertas Kerja Epistema Institute No. 01/2012.
- Hanafie, R. (2010). *Pengantar ekonomi pertanian*. Penerbit Andi.
- Puspitasari, N., Puspitawati, H., & Herawati, T. (2014). *Peran Gender, Kontribusi Ekonomi Perempuan, dan Kesejahteraan Keluarga Petani Hortikultura*. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 6 (1).
- Rahima, S. (2006). *Perempuan Bekerja, Dilema Tak Berujung*. Diakses pada tanggal, 5.
- Zehra. (2008). *The Economic Contribution of Pakistan Women Through Unpaid Labor*. Pakistan: Society for Alternative Media and Research.

- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan *Good governance*: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Dipresentasikan dalam The 5th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia.
- Nugroho, R. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Newberry, J. (2012). Back door Java: negara, rumah tangga, dan kampung di keluarga Jawa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ihromi, T. O., Irianto, S., & Luhulima, A. S. (2000). Penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Penerbit Alumni.
- Tinker, I. (Ed.). (1990). Persistent inequalities: Women and world development. New York: Oxford University Press.
- Sumaryanto, R, Pasaribu, S, Tarnyoto, A., dan Sayaka. B., (1994). Studi dinamika penguasaan lahan dan kesempatan kerja. Patanas. PSE, Bogor.
- Lasswell, M. E., & Lasswell, T. E. (1987). Marriage and the Family. Wadsworth Pub. Co..
- Megawangi, R. (1999). Membiarkan berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan
- Puspitasari, N., Puspitawati, H., & Herawati, T. (2014). Peran Gender, Kontribusi Ekonomi Perempuan, dan Kesejahteraan Keluarga Petani Hortikultura. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 6 (1).
- Djajanto, P. (2011). BUMN Motor Ketahanan Pangan. *Buletin GP3K*, No.3, hal 9, Oktober-November 2011
- Sjamsuddin, S. (2006). *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: CV. Sofa Mandiri.
- Sunarti, E., & Khomsan, A. (2006). Kesejahteraan keluarga petani, mengapa sulit diwujudkan. Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
- Gulo, W. (2002). Metodologi penelitian. Grasindo.
- Prahalad, C.K., (2005). *The Fortune at The Bottom of The Pyramid. Eradicating Poverty Through Profits*. Wharton School Publishing. USA.
- Anggoro, (2011). Politik Pembangunan Pangan Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani Indonesia. series of lecture dalam rangka LUSTRUM XIII Fakultas Pertanian UGM
- Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, A. (1999, September). Bagaimana hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam diatur. In Forestry Roundtable Discussion, Wisma PKBI (20 Oct 1999) and at the Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif (WATALA and BAPPENAS, Propinsi Lampung, 11 Oct 2000).
- Silalahi, D., & VIII, S. P. H. N. (2003, July). Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi. In Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar.